

# DAMPAK GERAKAN #METOO DI KOREA SELATAN PADA TAHUN 2018-2020

Oleh : Sundari Meilanesia

(sundarimeilan64@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi : 11 Buku, 12 Jurnal, 47 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This research explains about the impact of #MeToo Movement in South Korea in 2018-2020. #MeToo Movement was founded by Tarana Burke, an American woman activist and aims to fight against sexual harassment and sexual violence. A tweet about this #metoo movement was popularized by Alyssa Milano in 2017. This #MeToo momentum then was harnessed by South Korea's women to accuse the patriarchal which has implications for gender inequality and sexual harassment. Policy changes as a result of the movement also be discussed in this study.*

*This research is a qualitative research that aims to create a systematic and objective picture. The data collection technique used is document analysis. The case of #MeToo in South Korea is analyzed with the theory of social movements against social change. The level of analysis used is the nation state level of analysis.*

*Based on this research, it can be concluded that the #MeToo Movement is still incapable in changing the patriarchal system that is detrimental to women in South Korea. Despite of the policy changes there still has been no significant change as there has been no decrease in the rate of sexual violence.*

**Keywords:** *#metoo movement, sexual violence, South Korea, feminism*

## PENDAHULUAN

Gerakan #MeToo yang pertama kali dicanangkan oleh seorang aktivis wanita asal AS Tarana Burke pada tahun 2006 bertujuan untuk menyuarakan kepedulian terhadap isu pelecehan seksual. Pada awalnya gerakan #MeToo dilatar belakangi oleh pengakuan Heaven, seorang anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual, kepada Burke di dalam sebuah acara

*youth camp.* Di dalam laman resmi gerakan #MeToo Burke mengatakan sebagai berikut “Saat itu aku belum mampu untuk memberikan dukungan maupun semangat untuk Heaven walaupun aku mengerti perasaan dan situasi yang dialami gadis kecil itu. Sejak hari itu aku bertekad untuk menyuarakan #MeToo agar lebih banyak suara wanita yang dapat

didengar dan diberi kekuatan.”<sup>1</sup> Gerakan #MeToo kemudian mulai digaungkan sejak hari itu.

Meskipun dibentuk pada tahun 2006, gerakan ini baru populer pada tahun 2017 lewat sebuah tagar Twitter yang dibuat oleh seorang aktris bernama Alyssa Milano. Milano merupakan salah satu korban pelecehan seksual seorang produser film ternama yang bernama Harvey Weinstein.<sup>2</sup> Melalui tagar #MeToo Milano mengajak publik untuk bersama-sama menyuarkan kasus pelecehan seksual yang pernah mereka alami. *Tweet* ini kemudian ramai diikuti oleh ribuan orang lainnya.

Gerakan #MeToo ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, salah satunya Korea Selatan. Gerakan ini pertama kali digaungkan oleh seorang jaksa penuntut bernama Seo Ji Hyun, yang mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya dalam salah satu wawancara televisi pada tahun 2018. Seorang mantan pejabat kementerian kehakiman dituduh menjadi pelaku tindakan kriminal tersebut. Momentum ini kemudian memicu ratusan wanita di Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam gerakan #MeToo.<sup>3</sup>

Menurut Kim Jinsook, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang seksis dan misoginis.<sup>4</sup> Hal ini

disebabkan karena paham Neo-konfusianisme masih melekat di dalam pribadi tiap masyarakatnya.<sup>5</sup> Paham ini melatarbelakangi terjadinya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh para lelaki di Korea Selatan. Meskipun paham Konfusius ini merupakan ajaran lama, namun kebiasaan yang dilakukan nenek moyang mereka masih terbawa sampai sekarang. Budaya patriarki ini kemudian bercabang ke berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Isu pelecehan seksual sudah bukan merupakan hal yang baru di negeri ini. Berdasarkan data dari Kepolisian Korea Selatan pada tahun 2019, wanita menjadi korban dari 98 persen dari hampir 10.000 kasus kejahatan. Dan selama 1,8 hari seorang wanita terbunuh atau nyaris terbunuh di negara ini pada tahun 2019.<sup>6</sup> Salah satu contoh kasus dalam kehidupan sosial, datang dari kejahatan *Molka* atau kejahatan kamera tersembunyi. Kejahatan *Molka* sendiri sudah terjadi sejak tahun 2012 dengan laporan sebanyak 2.400 kasus. Kejahatan ini dilakukan oleh pria yang secara diam-diam meletakkan kamera perekam tersembunyi di tempat-tempat publik seperti: toilet umum, tempat kerja, sekolah, ataupun transportasi umum, video ini kemudian disebar ke sosial media dan biasanya digunakan juga sebagai *revenge porn*.<sup>7</sup> Namun pengadilan Korea Selatan tidak memberikan hukuman berat pada

---

<sup>1</sup>Gerakan #MeToo,”History ad Inception,” diakses 12 Februari 2021, <https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/>

<sup>2</sup>Gurvinder Gill dan Imran Rahman-Jones, “Me Too Founder Tarana Burke: Movement is not over,” *BBC News*, 9 Juli 2020, <https://www.bbc.com/news/newsbeat-53269751>

<sup>3</sup>Laura Bicker, “#MeToo movement takes hold in South Korea,” *BBC News*, 28 Maret 2018, <https://www.bbc.com/news/world-asia-43534074>

<sup>4</sup>Kim J, “Misogyny for Male Solidarity: Online Hate Discourse Against Women in South Korea,” di dalam *Mediating Misogyny* editor Vickery J, Everback T (Palgrave Macmillan, Cham, 2018), hlm 153

---

<sup>5</sup>Ibid. dalam *Book of Rites* ch 12 dan 44.

<sup>6</sup>Olivia Schieber, “South Korea Needs to Contend With Sexual Violence,” *Foreign Policy*, 10 Agustus 2020, <https://foreignpolicy.com/2020/08/10/south-korea-needs-to-contend-with-sexual-violence/>

<sup>7</sup>Lily Grace Tabanera, “What is ‘Molka’ and why Is It A Serious Problem in Korea?,” *Cosmopolitan*, 14 Januari 2021, <https://www.cosmo.ph/news/molka-south-korea-hidden-spy-camera-problem-a2520-20210114-lfrm>

pelaku kejahatan seksual, salah satunya, seorang pemerkosa hanya mendapatkan hukuman minimal 0 sampai 3 tahun penjara. Selain itu, kasus kejahatan seksual dalam bidang pendidikan terjadi di Sekolah Gwangju Inhwa dimana para guru melakukan pelecehan seksual terhadap siswa tuna rungu, namun para pelaku hanya diberi hukuman seberat dua setengah tahun penjara.<sup>8</sup> Hukuman yang diberikan oleh pemerintah dinilai cukup lunak karena tidak memberatkan pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.

Di tempat kerja juga wanita sulit menghindari ajakan atasan yang mengajak mereka ke karaoke lalu bermabuk-mabukan bersama, hal ini kemudian memicu adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan maupun rekan kerjanya.<sup>9</sup> Adanya ketakutan akan terancamnya keamanan posisi dan gajinya di perusahaan memaksa para wanita ini melakukan suruhan para atasan yang secara langsung maupun tidak telah melecehkan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan menganalisis tentang dampak dari Gerakan #MeToo di Korea Selatan pada tahun 2018-2020 dan perubahan yang dihasilkan dari Gerakan #MeToo. Tulisan ini kemudian menarik untuk dikaji secara mendalam karena meskipun Korea Selatan merupakan negara maju, namun negara

ini memiliki masalah dalam kekerasan terhadap perempuan.

## KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *document analysis* atau studi kepustakaan. Sedangkan tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisis negara bangsa. Semua perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan yang disorot harus berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, kita harus mempelajari aktivitas setiap individu, kelompok, dan organisasi dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Penulis menggunakan perspektif konstruktivisme yang berpandangan bahwa masyarakat dibentuk oleh budaya di sekitarnya. Dalam perspektif ini, aktor-aktor non-negara turut memerankan bagian yang sama pentingnya dalam sistem internasional. Norma yang dianut juga menjadi aspek pertimbangan yang membentuk sikap yang diberikan oleh para aktor. Setidaknya terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme yang relevan bagi studi Hubungan Internasional : pertama, keyakinan bahwa persatuan umat manusia lebih ditentukan atas konstruksi nilai yang dianut bersama dibandingkan pengaruh materi. Keyakinan tersebut menggambarkan dominasi perspektif idealis dalam disiplin Hubungan Internasional terutama sebelum perang dunia ke II; dan kedua, nilai yang dianut bersama menjadi penentu yang lebih unggul terhadap identitas dan kepentingan

---

<sup>8</sup>Korea Herald, "Is punishment for sex crime too lenient?" 19 Desember 2011, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111219001050>

<sup>9</sup> Jason Strother, "South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harassment," *VOA News*, 11 November 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/east-asia-pacific/south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment%3famp>

---

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

aktor-aktor daripada faktor-faktor alam. Artinya interaksi antar individu (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya) lebih penting dibandingkan motif, alasan dan kepentingan para aktor di lingkungan sekitarnya.<sup>11</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial (*social movement*). Menurut Alberto Melucci, gerakan sosial adalah sebuah kelas spesifik dari fenomena kolektif yang mencakup tiga aspek, yaitu bentuk dari kegiatan kolektif yang menyangkut solidaritas, terlibat konflik sehingga menyebabkan pertentangan dengan musuh yang memiliki nilai atau barang yang sama, dan merusak batas dari kecocokan di dalam sistem sehingga dapat diterima tanpa mengubah strukturnya. Menurutnya, gerakan sosial tidak terkait secara nyata dalam konflik politik. Pergerakan mereka secara umum berada di dalam wilayah pergerakan, yaitu jaringan kelompok atau individu yang berbagi identitas kolektif dan konflik budaya.<sup>12</sup>

Melucci berpandangan bahwa dalam masyarakat yang dibentuk oleh informasi dan tanda-tanda, gerakan sosial memainkan peranan penting sebagai pembawa pesan yang mengekspresikan kecenderungan dan modalitas yang bertentangan. Dampak terpenting dari gerakan sosial baru adalah untuk memperlihatkan bentuk kekuasaan dibalik rasionalitas prosedur administratif, dengan cara ini aksi

kolektif menekankan sifat dunia yang dibentuk secara sosial dan kemungkinan untuk perubahan alternatif. Kecondongan masyarakat untuk terlibat dalam aksi kolektif terkait dengan kapasitas mereka untuk menegaskan identitas mereka. Ini juga berarti bahwa konstruksi sosial dari identitas kolektif merupakan prasyarat dan pencapaian utama terhadap gerakan sosial baru. Selain itu Melucci menganggap bahwa pencapaian yang diraih oleh sebuah gerakan merupakan hasil dari usaha terus menerus bukan sebagai titik awal dari aksi kolektif tersebut. Banyak aksi kolektif yang bersarang dalam jaringan-jaringan kelompok-kelompok yang bergabung menjadi organisasi yang berbentuk perjuangan.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mendasari keberhasilan maupun kegagalan sebuah gerakan sosial, diantaranya adalah: pertama, hasil kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan oleh sebuah gerakan, tidak selalu sesuai dengan perubahan nyata yang diinginkan. Kedua, gerakan sosial pada umumnya bukanlah entitas yang monolitik atau homogen, tetapi melibatkan banyak aktor yang bercita-cita untuk mencapai tujuan konvergen melalui banyak strategi pada waktu yang berbeda. Ketiga, tanpa tekanan aktor transnasional di dalam sebuah gerakan, mungkin gerakan tersebut tidak akan berhasil. Keempat, konsep sukses atau gagal merupakan masalah subjektivitas karena pandangan peserta gerakan dan pengamat eksternal mungkin berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hadiwinata, Bob Sugeng. "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme," Di dalam Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Akar, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

<sup>12</sup> Mario Diani, "The Concept of Social Movement," *The Sociological Review*, 1992 0038-0261.

---

<sup>13</sup> Steven M. Buechler, "New Social Movement Theories," *The Sociological Quarterly* Volume 36, No 3, (1995) Hlm 446.

<sup>14</sup> Raza Saeed, *Conceptualising Success and Failure for Social Movements, Law, Social Justice & Global Development*, (2009) Issue 2.

## PEMBAHASAN

Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, Korea Selatan tidak mengalami gelombang feminisme secepat dunia Barat karena Korea Selatan memfokuskan pada pembangunan ekonomi negaranya.<sup>15</sup> Strategi utama pembangunan ekonomi Korea Selatan adalah industrialisasi berorientasi ekspor yang padat karya. Wanita memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian nasional ini. Dalam sistem perdagangan dunia, Korea Selatan unggul dalam melimpahnya tenaga kerja yang murah. Korea telah mengumpulkan tenaga kerja berupah rendah yang tidak terampil, diantaranya adalah kaum muda dan para wanita. Terjadi peningkatan jumlah pekerja wanita antara 1963 dan 1990 sebanyak empat belas kali lipat.<sup>16</sup>

Berdasarkan data diatas jelas bahwa wanita Korea Selatan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Namun meskipun partisipasi mereka yang luas dalam pembangunan ekonomi, status perempuan masih jauh dari kata memuaskan. Faktanya terdapat perbedaan besar antara kontribusi perempuan dan imbalan ekonomi mereka. Sampai tahun 1987, upah rata-rata perempuan selalu kurang dari setengah upah laki-laki.

Ditengah pembangunan menjadi negara maju, para wanita pada saat itu berjuang keras untuk mendapatkan haknya di hadapan hukum dan di dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian mendorong para wanita untuk memperjuangkan haknya melalui

berbagai gerakan yang menuntut kesetaraan wanita.

Pertama, *Korean comfort women*. *Korean Comfort Women* adalah wanita Korea penghibur yang melayani tentara Jepang pada masa kolonialisme. Orang Korea lebih sering menggunakan istilah *Chongshindae* ("Korps relawan" wanita) untuk menyebut para budak seks ini. Budaya prostitusi ini kemudian mulai diilegalkan pada tahun 1956, ketika Undang-Undang Pencegahan Pelacuran disahkan. Ketika para aktivis perempuan akhirnya mengangkat masalah *Chongsindae*, tanggapan awal dari pemerintah Korea Selatan adalah mengabaikan mereka. Pada November 1990, berbagai organisasi wanita bergabung bersama untuk membentuk *Chongdaehyop (the Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan)* di bawah kepemimpinan Yun Chung-Ok dan Lee Hyo-Chae.

Kedua, gerakan feminisme Minjung. Perkembangan gerakan wanita di Korea bermula dari gerakan Minjung. Gerakan Minjung berasal dari kesengsaraan para wanita muda pekerja pabrik yang didayagunakan secara ekstrim dalam pabrik industri ekspor untuk menghasilkan modal awal demi kemajuan ekonomi Korea Selatan. Gerakan ini berfokus untuk mengerahkan para wanita yang paling tertindas yang berasal dari lingkungan pedesaan yang miskin.<sup>17</sup> Gerakan feminisme Minjung dibagi menjadi dua tahapan, yang pertama memperlihatkan perjuangan para buruh wanita untuk mendirikan serikat yang demokratis, dan kedua tentang bagaimana gerakan

---

<sup>15</sup> The constitution of the republic of korea, Chapter II Rights and Duties of Citizens.

<sup>16</sup> Kyung Ae Park, "Women and Development: The Case of South Korea," *Comparative Politics*, vol. 25, no. 2 (1993), hlm. 131-133

---

<sup>17</sup> Miriam Ching Yoon Louie, "Minjung Feminism, Korean Women's Movement for Gender and Class Liberation," *Women's Studies International Forum*, vol. 18, no.4 (1995), hlm. 417.

wanita ini dijalankan secara teoritis, praktis, dan melalui organisasi.

Ketiga, *Yo'Kong Undong* : Gerakan wanita pabrik. *Yo'kong*, atau gadis pabrik, adalah gadis-gadis yang diambil dari pedesaan yang bekerja keras siang dan malam dalam industri yang berorientasi ekspor, seperti tekstil, garmen, elektronik, plastik, rambut palsu dan pengolahan makanan di bawah pemerintahan Jenderal Park Chung Hee. Mereka mendapatkan upah yang sangat minim, pelecehan seksual, kelelahan, dan tanggungjawab untuk menafkahi orangtua dan saudaranya yang membutuhkan biaya pendidikan. Sebagai bentuk protes akan ketidakadilan tersebut, para wanita ini kemudian memelopori gerakan serikat demokratis sepanjang tahun 1970-an ketika hak-hak buruh sepenuhnya ditangguhkan di bawah darurat militer.

Keempat, Megalia. Megalia menjadi titik awal kebangkitan feminisme di Korea Selatan. Para pengikutnya hanya menggunakan sarana internet untuk memancing provokasi dengan para pria muda di Korea yang misoginis. Megalia secara aktif mengusung aksi-aksi politik yang berfokus pada kesetaraan gender seperti B-wave Korea dan DSO. B-wave Korea adalah gerakan yang menolak kehamilan dan sistem patriarki di, sedangkan DSO bertujuan untuk menghentikan pornografi konsensual digital.<sup>18</sup>

## ISU PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN

---

<sup>18</sup> Euisol Jeong dan Jieun Lee, "We take the red pill, we confront the DickTrix: online feminist activism and the augmentation gendered realities in South Korea," *Feminist Media Studies* (2018) hlm. 2.

Korea Selatan adalah salah satu negara dengan tingkat kasus pelecehan seksual yang tinggi. Berdasarkan data dari Kepolisian Korea Selatan pada tahun 2019, wanita menjadi korban dari 98 persen dari hampir 10.000 kasus kejahatan. Dan selama 1,8 hari seorang wanita terbunuh atau nyaris terbunuh di negara ini pada tahun 2019.

Salah satu contoh kejahatan seksual ini adalah *molka crime* (kamera tersembunyi). Kejahatan kamera tersembunyi atau *molka* merupakan hal yang sangat umum di Korea Selatan. Kamera kecil tersembunyi dengan mudah dapat ditemukan di toilet-toilet umum, di tempat kerja, maupun di transportasi umum. Video rekaman ini kemudian di upload di situs khusus maupun dijadikan sebagai ancaman atau *revenge porn*. Banyaknya kasus yang dilaporkan baik di toilet umum, transportasi umum, maupun di sekolah telah mengakibatkan protes di stasiun Hyewa yang dilakukan oleh ribuan wanita pada tahun 2018.

Selain *molka crime*, dalam dunia kerja di Korea Selatan, dikenal istilah *Hwaesik Culture* atau perayaan kantor dengan melakukan minum-minum dan bernyanyi bersama di karaoke. Budaya ini merupakan kultur yang sangat umum dilakukan di lingkungan kantor di Korea Selatan. Para anak magang maupun semua karyawan biasanya akan diajak oleh atasannya dan mereka sukar untuk menolak karena posisi dan jabatan mereka yang kurang menguntungkan. Aksi mabuk-mabuk ini kemudian tidak sedikit mengarah kepada pelecehan seksual yang dilakukan para atasan maupun rekan kerja pria terhadap para rekan wanita. Adanya relasi kuasa menyebabkan para korban hanya menyimpan keresahan-keresahan ini karena takut adanya ancaman posisi mereka di perusahaan.

## GERAKAN FEMINISME DI KOREA SELATAN

Berbagai kampanye diselenggarakan oleh para feminis pegiat kesetaraan gender demi menuntut keadilan kaum hawa di lingkungan masyarakat. Pertama, protes di stasiun Hyewa. Pada 19 Mei 2018, lebih dari 12.000 wanita berbaju merah melakukan demonstrasi di Stasiun Hyeonwa di Seoul, Korea Selatan. Mereka menyerukan protes atas diskriminasi yang didapatkan oleh korban pornografi ilegal dengan memakai beragam slogan yang berbunyi “Korban pria mendapatkan investigasi kilat, sedangkan korban wanita ditolak untuk melakukan investigasi,” serta “Berikan investigasi yang adil.” Demonstrasi ini diselenggarakan oleh sebuah kafe online di situs portal Daum (disebut “Protes untuk Menyangkal Investigasi Bias ke Fotografi Ilegal”). Mereka juga melanjutkan keluhan tentang kegagalan masyarakat dalam menangani permasalahan kamera tersembunyi ini.<sup>19</sup>

Sekitar 60.000 wanita dengan payung merah dan jas hujan, berkumpul di Stasiun Hyeonwa untuk melakukan protes kelima terkait kejahatan kamera tersembunyi. Para aktivis juga menyerbu pejabat kehakiman dan legislatif dengan pesan teks. Para protestan menganggap bahwa kejahatan seksual kerap terjadi karena petinggi legislatif dan kehakiman puas dengan pelecehan seksual tersebut. Demonstrasi ketiga ini terjadi di Stasiun Hyeonwa, sedangkan pada demonstrasi

selanjutnya pindah ke Gwanghwamun Square.<sup>20</sup>

Selanjutnya, *Escape the Corset*. *Escape the corset* adalah gerakan feminis yang menentang standar kecantikan yang dibuat di Korea Selatan. Dimulai di awal tahun 2018 oleh Lina Bae, seorang beauty influencer yang menunjukkan pengalamannya menghadapi standar kecantikan Korea Selatan yang tidak realistis. Video ini berisi dirinya yang menghapus makeup dan berkata “aku membuat video ini dengan tujuan agar wanita dapat bebas dari tekanan.” Bertujuan untuk menentang standar kecantikan Korea Selatan. Ribuan wanita melakukan kampanye untuk menghancurkan make-up dan memotong rambutnya.<sup>21</sup>

Korea Selatan terkenal dengan standar kecantikannya yang sangat ketat, bahkan seorang wanita dapat melakukan sampai 10 tahap *skincare* dan bahkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan *makeup* sebagai rutinitas kesehariannya. Negara ini juga terkenal dengan operasi plastiknya yang mendunia. Hal ini dilakukan demi memenuhi ekspektasi masyarakat Korea terhadap standar kecantikan dimana wanita dituntut untuk memiliki kulit pucat, mata besar, hidung mancung, kaki kurus, bibir tebal dan merah, juga wajah yang kecil. Stereotipe ini telah melekat di diri tiap-tiap orang Korea dan bagi wanita yang

---

<sup>19</sup> *Hankyoreh*, “Women gather to protest Biased investigations into hidden-camera incidents,” 21 Mei 2018, [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/845603.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/845603.html)

---

<sup>20</sup> Jung Hae Myoung, “Spycam Porn Protesters Speak Out Against Male-centered Ruling,” *The Korea Times*, 10 Agustus 2018, <https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsidx=256570>

<sup>21</sup> Laura Bicker, “Why Women in South Korea are Cutting ‘the Corset’,” *BBC News*, 10 Desember 2018, <https://www.bbc.com/news/world-asia-46478449>

tidak memenuhi standar tersebut biasanya akan diejek oleh masyarakat.

Gerakan *escape the corset* ini kemudian dijadikan sebagai bentuk protes dan penolakan akan standar sosial tersebut. Gerakan ini juga mengiring isu patriarkis dan diskriminasi terhadap wanita di dunia kerja, di rumah maupun di lingkungan masyarakat.

Ketiga, *4B Movement*. Gerakan 4B (*No dating, No sex, No marriage, and No child-rearing*) adalah gerakan feminis radikal yang menentang pacaran, melakukan hubungan seks, pernikahan, dan merawat anak. Gerakan ini baru terbentuk pada tahun 2019 sebagai bentuk protes terhadap nilai-nilai keras patriarki di Korea Selatan. Sejumlah perempuan melawan stigma tradisional yang memberlakukan dominasi laki-laki di dalam masyarakat. Tidak ada data resmi terkait jumlah pasti pengikut gerakan ini, tapi salah satu anggota mengatakan pengikutnya setidaknya berjumlah 4.000 orang. Gerakan ini digagas oleh seorang feminis Korea Selatan bernama Bonnie Lee.<sup>22</sup> Lee beranggapan bahwa dengan adanya budaya patriarki, kebebasan wanita dikekang untuk menjalani hidup terutama ketika wanita tersebut sudah menikah. Bahkan menjadi wanita yang berpendidikan justru membawa kerugian. Wanita yang sudah menikah dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga, istri, dan menantu yang baik

---

<sup>22</sup> Agence France-Presse, "4B Is The Feminist Movement Persuading South Korean Women To Turn Their Backs On Sex, Marriage And Children," *South China Morning Post*, 7 Desember 2019.  
<https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3041058/why-south-korean-women-are-turning-their-backs-sex-marriage-and>

untuk keluarganya. Kebebasan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dikekang karena perusahaan-perusahaan tidak mau menerima wanita apalagi yang sudah menikah dan mempunyai anak.

Lee bukan satu-satunya wanita yang berpikir demikian. Sejumlah wanita dinyatakan sudah mengikuti gerakan ini dan menuntut protes terhadap kerasnya budaya patriarki yang berlaku di Korea Selatan. Berdasarkan data statistik Korea pada tahun 2019, terjadi penurunan angka pernikahan sejumlah 2,6% pada tahun 2018, dan angka perceraian naik sejumlah 2,5% sejak tahun 2017.<sup>23</sup> Hal ini merupakan hasil dari sikap diskriminasi yang diberikan terhadap wanita yang sudah menikah di Korea Selatan.

Keempat, *#MeToo Movement*. Gerakan *#MeToo* yang berawal di Amerika Serikat ini juga mendapatkan respon yang baik di Korea Selatan. Kampanye ini dimulai saat seorang jaksa bernama Seo Ji Hyun mengaku telah dilecehkan oleh seorang mantan pejabat kehakiman. Hal itu kemudian menjadi titik awal yang memicu menyebarnya gerakan *MeToo* di Korea Selatan. Terdapat beberapa aspek yang disorot dalam gerakan *#MeToo* di Korea Selatan. Pertama, di bidang perfilman. Di dunia perfilman, seorang aktor senior bernama Jo Min Ki dituduh atas pelecehan seksual terhadap sedikitnya delapan wanita, namun sayangnya Jo harus mempercepat masa hukumannya dengan melakukan bunuh diri. Awalnya Jo menolak tuduhan ini, namun kemudian dia mengeluarkan

---

<sup>23</sup> *Statistics Korea*, "Marriage and Divorce Statistics in 2018," diakses pada 16 Mei 2021 <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/11/index.board?bmode=read&bSeq=&aSeq=375536&pageNo=1&rowNum=10&navCount=10&currPg=&searchInfo=&sTarget=title&sTxt> diakses pada 16 Mei 2021

permintaan maaf kepada para penuduhnya pada 27 Februari. Jo juga sempat dipecat dari Universitas Cheongju tempatnya bekerja setelah tuduhan atas pemerkosaan dan pelecehannya terhadap siswa terungkap.<sup>24</sup>

Kasus lainnya datang dari seorang sutradara wanita yang dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap rekan wanitanya pada tahun 2015. Lee Hyun Joo kemudian segera pensiun menjadi sutradara dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun, dan 40 jam terapi pendidikan seks.<sup>25</sup>

Selanjutnya di bidang politik, seorang politisi bernama Ahn Hee Jung seorang mantan gubernur Provinsi Chungcheong Selatan didakwa atas tuduhan memperkosa sekretarisnya, Kim Ji-eun setidaknya sembilan kali antara Juli 2017 dan Februari 2018. Ahn akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara setelah sebelumnya beliau dibebaskan karena dianggap tidak memiliki cukup bukti terhadap dakwaannya. Awalnya Ahn diisukan akan menggantikan jabatan Presiden Moon Jae In pada tahun 2022, namun dia tidak berhasil mencalonkan diri karena kasus yang menimpanya. Kejatuhannya dimulai Maret lalu ketika Kim, mantan sekretarisnya mengatakan di televisi bahwa dia telah berulang kali memaksanya untuk berhubungan seks

dengannya.<sup>26</sup> Sebagai negara yang kental dengan budaya patriarki dan hirarki yang nyata, aksi tersebut merupakan tindakan yang berani, mengingat pada umumnya korban akan tetap bungkam dan tidak melaporkan kasus yang mereka alami.

Laporan lainnya datang dari seorang anggota parlemen bernama Min Byung doo yang mengajukan pengunduran dirinya ke Majelis nasional setelah seorang wanita menuduhnya melakukan pelecehan seksual di ruang karaoke. Min mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat kejadian itu, tetapi dia berniat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di parlemen dan mundur dari pemilihan untuk menjadi calon walikota perwakilan partai dalam pemilihan daerah yang akan datang.<sup>27</sup>

Di bidang pendidikan, pada tahun 2018, tagar masalah sosial yang paling banyak di-tweet di Korea Selatan adalah #SchoolMeToo. Dengan menggunakan tagar #SchoolMeToo, mereka menceritakan guru yang telah melakukan pelecehan secara verbal atau fisik selama bertahun-tahun, beberapa membujuk mereka ke ruang pribadi untuk menyerang mereka. Selama 10 bulan terakhir, siswa di lebih dari 65 sekolah di seluruh negeri telah menggunakan media sosial dan forum publik lainnya untuk berbicara tentang pelecehan seksual oleh para guru.

Pada tahun 2012, seorang siswa melaporkan bahwa seorang guru pria di

---

<sup>24</sup> *BBC News*, "Jo Min-Ki: South Korean Actor Found dead After #MeToo Allegations," 9 Maret 2018, <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-43343536>

<sup>25</sup> Patrick Frater, "South Korean Director Retires After Sex Assault Verdict, Social Media Storm," *Variety*, 9 Februari 2018, <https://variety.com/2018/film/asia/korea-lesbian-director-retires-after-sex-assault-verdict-1202693504>

---

<sup>26</sup> Choe Sang Hun, "Ex-Presidential Candidate in South Korea Is Jailed for Sexual Assault," *The New York Times*, 1 Februari 2019, <https://www.nytimes.com/2019/02/01/world/asia/south-korea-metoo-ahn-hee-jung.html>

<sup>27</sup> Heekyong Yang, "South Korea's Ruling Party Reels From More Sex Abuse Allegations Vows 'zero tolerance'," *Reuters*, 12 Maret 2018, <https://www.reuters.com/article/uk-southkorea-metoo-politician-idUKKCN1G00VB>

SMA Swasta Yonghwa Girls di Seoul menyentuh mereka secara tidak tepat, namun mereka diabaikan. Sekarang pasca masuknya gerakan MeToo ke Korea Selatan, mereka mendapatkan tanggapan yang berbeda dengan ketika pertama kali mereka melaporkan kasus tersebut. Usai laporan kedua, akhirnya tuduhan mereka ditanggapi oleh pihak berwenang dan guru tersebut dipecat.

Dalam beberapa bulan terakhir, para siswi mengadakan pawai dengan beberapa ratus orang di pusat kota Seoul dan berkumpul di depan istana presiden untuk memprotes tindakan pelecehan tersebut. Mereka juga telah mengajukan pengaduan ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>28</sup> Di lingkungan kejam sistem pendidikan Korea Selatan, guru memiliki kendali besar atas siapa yang masuk perguruan tinggi, sehingga sangat sulit bagi siswa untuk menantang mereka.

## IMPLIKASI GERAKAN #METOO DI KOREA SELATAN

Sebagai penggerak gerakan #MeToo, Seo Ji Hyun telah mendorong ribuan massa di Korea Selatan untuk mendukung gerakan ini. Seo menuliskan dalam laman sosial media nya bahwa dia terinspirasi dari gerakan #MeToo di Amerika Serikat yang dibentuk pada 10 tahun lalu, hal ini yang kemudian mendorongnya untuk angkat suara ke hadapan publik.<sup>29</sup> Kampanye #MeToo ini bermula pada

---

<sup>28</sup> Victoria Kim, "Empowered by #MeToo, a new generation fights sexual abuse in South Korea's Schools," *Los Angeles Times*, 22 Februari 2019, [https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-metoo-schools-20190222-story.html?\\_amp=true](https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-metoo-schools-20190222-story.html?_amp=true)

<sup>29</sup> Linda Hasunuma dan Ki-young Shin, "#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo, #WithYou," *Journal of Women, Politics & Policy*, 40:1, (2019), hlm. 97-111

sebuah protes yang dilakukan oleh 200 wanita di pusat kota Seoul. Para wanita ini menceritakan pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami selama 2018 menit. Gerakan ini juga dikampanyekan lewat sosial media dan sebagai bentuk solidaritas tagar #WithYou pun menyebar mengikuti tagar #MeToo.

Selain mendapatkan respon positif, tuntutan balik didapatkan dari sekelompok pria yang merasa mendapatkan ketidakadilan akibat gerakan #MeToo ini. Moon sebagai pemimpin kelompok yang disebut *Dang Dang We* (martabat) mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang merepresentasikan keadilan hukum, anti-kebencian, dan kesetaraan gender dengan sesungguhnya. Moon memulai kelompok ini pada tahun 2018 saat seorang pebisnis berusia 39 tahun dihukum seberat 6 bulan masa tahanan karena dilaporkan memegang bokong seorang wanita di sebuah restoran Korea. Kasus ini menyulut kemarahan karena seorang pria dapat dihukum tanpa bukti di luar pengakuan korban. Bahkan pada awal September, Moon dan kelompoknya membawa kasus ini ke majelis nasional, badan legislatif tertinggi Korea untuk menyatakan keberatan mereka atas kerugian dari gerakan tersebut. Sebuah survei yang dilakukan oleh Realmeter pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dalam lebih dari 1.000 orang dewasa, sebanyak 76% pria berusia 20-an dan 66% pria berusia 30-an menentang feminisme.<sup>30</sup> Menurut para pria yang menentang gerakan ini, para feminis memainkan standar ganda salah satu contohnya yaitu jika pria melihat wanita yang berpakaian terbuka

---

<sup>30</sup> Jake Kwon, "South Korea's Young Men Are Fighting Against Feminism," *CNN*, 24 September 2019, <https://www.cnn.com/2019/09/21/asia/korea-angry-young-men-intl-hnk/index.html>

maka akan dianggap sebagai objektifikasi seksual dan kekerasan gender, sedangkan para wanita dapat menikmati lelaki yang berpakaian serupa. Mereka juga berpandangan bahwa diskriminasi gender dan budaya patriarki dilakukan oleh generasi terdahulu dan hal itu tidak berdampak kepada wanita di generasi muda.

Presiden Korea Selatan, Moon Jae In, secara positif telah mendukung berlangsungnya gerakan #MeToo. Moon Jae In yang menyebut dirinya sebagai presiden yang feminis mengatakan dalam salah satu pertemuannya dengan para penasihatnya bahwa dia mengapresiasi para korban yang menyuarkan dan melaporkan kasusnya, dia juga mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut secara menyeluruh. Moon juga menegaskan bahwa kekerasan gender dan pelanggaran seksual berakar dari budaya dan pandangan masyarakat, oleh karena itu perubahan harus dilakukan secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat.<sup>31</sup>

Terpilihnya presiden Moon Jae-In membawa sedikit harapan bagi masyarakat Korea Selatan karena beliau adalah pemimpin yang jauh lebih toleran dibanding pemimpin terdahulu. Beragam kemajuan telah diupayakan oleh Moon untuk memperbaiki keadaan wanita di negara ini salah satunya untuk menambah persentase wanita yang menempati bangku pemerintahan. Namun perkembangan ini ternyata berdampak buruk bagi Moon sendiri. Tampak pada pemilihan presiden pada tahun 2022 nanti banyak pria muda yang menarik dukungan mereka untuk

Moon dan partainya karena mereka merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Moon. Sebaliknya, wanita berusia 20-an dan 30-an tetap setia kepada Moon dan partainya dengan harapan tercapainya kesetaraan gender di bawah pemerintahannya.

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang dilaporkan seiring kampanye gerakan #MeToo di Korea Selatan membuat presiden Moon Jae In memutuskan untuk mengubah kebijakan penanganan pelecehan seksual di berbagai bidang, salah satunya tempat kerja. Sebuah amandemen dilakukan pada undang-undang Bantuan Keseimbangan Pekerjaan dan Keseimbangan Pekerjaan-Keluarga yang setara (Undang-Undang EEO) termasuk tindakan hukuman yang lebih keras. Perubahan-perubahan ini meliputi: pelatihan pelecehan seksual, perlindungan bagi korban dan saksi pelecehan, kewajiban untuk menyelidiki, kewajiban lebih lanjut pada pimpinan, dan menjaga kerahasiaan identitas. Selain itu, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan telah dirancang oleh satuan tugas pemerintah antar lembaga yang dipimpin oleh Chung, dikoordinasikan oleh kementerian kesetaraan gender, tenaga kerja, pendidikan, kehakiman dan budaya. Kebijakan ini meliputi hukuman bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk seks yang telah dinaikkan dari 5 menjadi maksimum 10 tahun dan undang-undang pembatasan dari tujuh menjadi 10 tahun. Untuk kejahatan pelecehan seksual, hukuman dinaikkan dari dua menjadi maksimum lima tahun dan undang-undang pembatasan dari lima menjadi tujuh tahun.

Meskipun dilakukan sejumlah perubahan kebijakan namun angka pelecehan seksual tidak menunjukkan

---

<sup>31</sup>*Aljazeera*, "South Korea's President Urges MeToo Investigations," 25 Februari 2018, <https://www.aljazeera.com/news/2018/2/26/south-koreas-president-urges-metoo-investigations>

penurunan yang berarti. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan angka kejahatan sebesar 1,5% dari tahun 2018. Terjadi penurunan angka pelecehan seksual pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 699 kasus. Namun angka kekerasan domestik meningkat sebanyak 26.559 kasus sejak tahun 2017. Meskipun terjadi penurunan pada angka pelecehan seksual, namun angka kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 pelaku kejahatan kekerasan domestik dilaporkan sebanyak 43.576. Selain itu korban syuting ilegal berjumlah 5.925 orang yang mana 82,9% korban adalah perempuan, angka ini naik dari 1.102 orang dari 4.823 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2019 kekerasan dalam rumah tangga menduduki peringkat dengan jumlah tertinggi diikuti oleh kekerasan seksual. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa isu pelecehan seksual masih berada di status yang sama dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti.<sup>32</sup>

Terlepas dari sejumlah kebijakan yang direvisi oleh pemerintah, perubahan terbesar yang diakibatkan oleh kampanye gerakan MeToo adalah berubahnya pandangan sosial terhadap pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap politisi dan selebriti dengan pengaruh kuat terus diberitakan oleh media. Pengungkapan ini telah menimbulkan kritik keras terhadap kehormatan dan karakter moral pelaku dalam masyarakat Korea dimana karakter moral sangat dihargai. Setiap kasus profil tinggi telah mendorong lebih banyak percakapan tentang isu-isu yang terlibat. Hal ini yang kemudian

---

<sup>32</sup>Korea Statistics, Women's Lives Through Statistics in 2020, diakses pada 26 Juni 2021, <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/13/2/index.board>

berdampak pada berubahnya cara pandang masyarakat terhadap isu pelecehan seksual.<sup>33</sup>

Selain itu laporan yang diungkap jaksa Seo Ji Hyun, dimana jaksa dikenal sebagai golongan elit, telah memacu wanita lain untuk angkat suara. Pasca tuduhan ini, lebih banyak korban terutama perempuan yang berani membuka kasus yang dialaminya dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Mereka juga melakukan tindakan yang lebih berani dengan bergabung pada banyak protes yang diikuti oleh puluhan ribu massa. Sebuah studi oleh Konfederasi Serikat Buruh Korea tahun lalu menunjukkan bahwa 52 persen responden mengatakan ada lebih sedikit lelucon seksual sekarang dan menampilkan perilaku tidak pantas dan meremehkan wanita. Selain itu di tempat kerja, para bos mengganti tempat hiburan mereka dengan berbagai alternatif lain selain di tempat karaoke, dan sebanyak 1.400 tempat karaoke telah ditutup secara massal menanggapi banyaknya kasus pelecehan seksual saat *hwaesik culture* di tempat karaoke.<sup>34</sup>

Di bidang pendidikan, mengikuti tagar #SchoolMeToo, beberapa guru yang terlibat dalam pengungkapan kasus #MeToo telah dipecat atau ditangguhkan tetapi yang lain gagal memperbarui kontrak mereka atau menerima peringatan lisan. Dengan sedikitnya perubahan di dalam negeri, feminis muda telah membawa kasus

---

<sup>33</sup> Jenna Gibson, "Will South Korea Finally Have Its Reckoning On Sex Crimes?," *The Diplomat*, 14 Agustus 2020, <https://thediplomat.com/2020/08/will-south-korea-finally-have-its-reckoning-on-sex-crimes/>

<sup>34</sup>Jason Strother, "South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harassment," *VOA News*, 11 November 2019, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment>

mereka ke PBB. Gerakan #SchoolMeToo secara resmi masuk dalam daftar pertanyaan untuk pemerintah Korea oleh komite PBB yang mengharuskan Kementerian Pendidikan untuk menyerahkan laporan tentang situasi tersebut.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Meskipun Gerakan #MeToo memiliki efek yang besar di Korea Selatan namun gerakan ini berlangsung singkat, karena tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di negara ini. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengubah regulasi terkait pelecehan seksual, namun tidak ada penurunan angka pelecehan seksual yang berarti. Gerakan ini hanya mampu mendorong diskusi lebih lanjut tentang isu pelecehan seksual di Korea Selatan. Berubahnya pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual dan meningkatnya keberanian para korban wanita untuk bersuara menjadi dampak terbesar dari gerakan ini di Korea Selatan.

Beberapa penyebab kegagalan dari gerakan ini adalah yang pertama, gerakan ini hanya digerakkan melalui sosial media sehingga tidak bisa menggapai seluruh kaum karena informasi yang tersebar juga terbatas. Kedua, lain halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat dimana terdapat perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran kekuasaan antara laki-laki dan wanita, hal ini sulit untuk dicapai di Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan merupakan negara yang sangat seksis dan misoginis sehingga sudah tertanam

pola pikir bahwa laki-laki akan selalu lebih mendominasi dibandingkan wanita. Selain itu, tidak adanya kerjasama antara pihak laki-laki untuk turut serta memberantas angka pelecehan seksual tersebut juga merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan gerakan ini. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi Korea Selatan untuk merubah budaya dan pola pikir masyarakatnya sampai ke akar-akarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Chung, Edward Y.J. *Korean Confucianism Tradition and Modernity*. Korea: The Academy of Korean Studies Press, 2015.

Hadiwinata, Bob Sugeng. "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme," Di dalam Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Akar, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

### Jurnal

Chai, Alice Yun. "Asian-Pacific Feminist Coalition Politics: The Chongshindae/Jugunianfu ("Comfort Women") Movement." *Korean Studies*. vol. 17 (1993): 67-91.

Ching Yoon Louie, Miriam. "Minjung Feminism, Korean Women's Movement for Gender and Class Liberation." *Women's Studies International Forum*, Vol. 18 No.4 (1995): 417-430.

---

<sup>35</sup>Ock Hyun Ju, "Despite #MeToo, change yet to come to schools," *The Korea Herald*, 4 Maret 2019, <http://m.koreaherald.com/amp.view.php?ud=20190304000800>

- Diani, Mario. "The Concept of Social Movement." (1992)
- Hasunuma, Linda dan Ki-young Shin. "#MeToo in Japan and South Korea: #WeToo #WithYou." *Journal of Women, Politics & Policy*, 40:1 (2019): 97-111. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2019.1563416>
- Jeong, Euisol dan Lee, Jieun. "We take the red pill, we confront the DickTrix: online feminist activism and the augmentation gendered realities in South Korea." *Feminist Media Studies*, (2018): 1-14
- Lee, Aie-Rie. dan Chin, Mikyung. "The Women's Movement in South Korea." *Social Science Quarterly*. vol. 88, no. 5 (2007): 1205-1226.
- M. Buechler, Steven. "New Social Movement Theories." *The Sociological Quarterly*, Vol. 36, No 3(1995): 441-464.
- Park, Kyung Ae. "Women and Development: The Case of South Korea." *Comparative Politics*. vol. 25, no. 2 (1993): 127-145.
- Saeed, Raza. Conceptualising Success and Failure for Social Movements. *Law, Social Justice & Global Development*. (2009) Issue 2.
- Media**
- Al Jazeera*. "South Korea's President Urges MeToo Investigations." 25 Februari 2018. <https://www.aljazeera.com/news/2018/2/26/south-koreas-president-urges-metoo-investigations>
- BBC News*. "Jo Min-Ki: South Korean Actor Found dead After #MeToo Allegations." 9 Maret 2018.
- Bicker, Laura. "Why Women in South Korea are Cutting 'the Corset'." *BBC News*. 10 Desember 2018. <https://www.bbc.com/news/world-asia-46478449>
- Bicker, Laura. "#MeToo movement takes hold in South Korea." *BBC News*, 28 Maret 2018. <https://www.bbc.com/news/world-asia-43534074>
- Frater, Patrick. "South Korean Director Retires After Sex Assault Verdict, Social Media Storm." *Variety*. 9 Februari 2018. <https://variety.com/2018/film/asia/korea-lesbian-director-retires-after-sex-assault-verdict-1202693504>
- Gibson, Jenna. "Will South Korea Finally Have Its Reckoning On Sex Crimes?" *The Diplomat*. 14 Agustus 2020. <https://thediplomat.com/2020/08/will-south-korea-finally-have-its-reckoning-on-sex-crimes/>
- Gill, Gurvinder dan Imran Rahman-Jones. "Me Too Founder Tarana Burke: Movement is not over." *BBC News*, 9 Juli 2020. <https://www.bbc.com/news/new-sbeat-53269751>
- Grace Tabanera, Lily. "What is 'Molka' and why Is It A Serious Problem in Korea?" *Cosmopolitan*, 14 Januari 2021. <https://www.cosmo.ph/news/molka-south-korea-hidden-spy-camera-problem-a2520-20210114-lfrm>
- Hankyoreh*. "Women gather to protest Biased investigations into hidden-camera incidents." 21 Mei 2018. [http://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/845603.html](http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/845603.html)
- Hun, Choe Sang. "Ex-Presidential Candidate in South Korea Is

- Jailed for Sexual Assault.” *The New York Times*. 1 Februari 2019.  
<https://www.nytimes.com/2019/02/01/world/asia/south-korea-metoo-ahn-hee-jung.html>
- Hyun Ju, Ock. “Despite #MeToo, change yet to come to schools.” *The Korea Herald*. 4 Maret 2019.  
<http://m.koreaherald.com/amp.view.php?ud=20190304000800>
- Kim, Victoria. “Empowered by #MeToo, a new generation fights sexual abuse in South Korea’s Schools.” *Los Angeles Times*. 22 Februari 2019.  
<https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-metoo-schools-20190222-story.html?amp=true>  
<https://www.pbs.org/newshour/world/women-in-india-are-also-saying-metoo>
- Korea Herald*. “Is Punishment for sex crime too lenient?” 19 Desember 2011.  
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20111219001050>
- Kwon, Jake. “South Korea’s Young Men Are Fighting Against Feminism.” *CNN*. 24 September 2019.  
<https://www.cnn.com/2019/09/21/asia/korea-angry-young-men-intl-hnk/index.html>
- Me Too Movement. “History and Inception.” Diakses 12 Februari 2021.  
<https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/>
- Myoung, Jung Hae. “Spycam Porn Protesters Speak Out Against Male-centered Ruling.” *The Korea Times*. 10 Agustus 2018.  
<https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsidx=256570>
- Presse, Agence France. “4B Is The Feminist Movement Persuading South Korean Women To Turn Their Backs On Sex, Marriage And Children.” *South China Morning Post*. 7 Desember 2019.  
<https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3041058/why-south-korean-women-are-turning-their-backs-sex-marriage-and>
- Schieber, Olivia. “South Korea Needs to Contend With Sexual Violence.” *Foreign Policy*, 10 Agustus 2020.  
<https://foreignpolicy.com/2020/08/10/south-korea-needs-to-contend-with-sexual-violence/>
- Strother, Jason. “South Korea’s #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harassment.” *VOA News*, 11 November 2019.  
<https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/east-asia-pacific/south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment%3famp>
- Yang, Heekyong. “South Korea’s Ruling Party Reels From More Sex Abuse Allegations Vows ‘zero tolerance’.” *Reuters*. 12 Maret 2018.  
<https://www.reuters.com/article/uk-southkorea-metoo-politician-idUKKCN1G00VB>

### Dokumen

- Korea Statistics*, Women’s Lives Through Statistics in 2020, diakses pada 26 Juni 2021,  
<http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/13/2/index.board>
- Korea Statistics*. Social Survey 2018. Diakses pada 25 Juni 2021.  
<http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/11/5/index.board>